

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan ketimpangan struktural di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu struktur ekonomi, sosial, dan politik. Fokus penelitian diarahkan pada peran keuangan Islam, pembangunan manusia, dan tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan data panel dari 53 negara anggota OKI pada periode 2017-2023. Analisis dilakukan menggunakan dua model regresi panel, perbedaannya terletak pada indikator variabel *Islamic finance* dan pengukuran pada variabel *regime*. Kedua model ini dianalisis menggunakan *fixed effect model* dengan *cross-section* SUR (PCSE) untuk memperoleh estimasi yang *robust* terhadap autokorelasi dan heteroskedastisitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Finance* pada model pertama tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antara negara yang mengadopsi keuangan Islam maupun tidak, namun berpengaruh positif dan signifikan pada model kedua. Sebaliknya, rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Hal ini didukung oleh teori *capability approach* yang menekankan pentingnya pendidikan dalam memperluas kesempatan ekonomi. Variabel pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan. Kemudian, *control of corruption* berpengaruh negatif dan signifikan, menegaskan peran penting penguatan institusi dalam menekan ketimpangan. Analisis terhadap rezim *electoral autocracy* tidak berpengaruh signifikan, sedangkan rezim *electoral democracy* justru berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Pada model kedua, *regime* juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan. Selanjutnya, adanya hubungan non linear antara GDP dan ketimpangan, berbentuk kurva U, dan tidak sesuai dengan hipotesis Kuznets.

Temuan tersebut menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan di negara-negara anggota OKI tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kualitas institusi, pembangunan manusia, dan struktur politik. Dengan demikian, strategi pengurangan ketimpangan perlu dilakukan melalui pendekatan multidimensi yang meliputi optimalisasi peran keuangan Islam, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Kata kunci: Ketimpangan pendapatan, *Islamic Finance*, pembangunan manusia, tata kelola pemerintahan, rezim politik, *cross-section* SUR (PCSE)